

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana Korupsi	16
B. Pidana Pembayaran Uang Pengganti	25
C. Kebijakan Hukum Pidana	34
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Data Penelitian.....	46
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	51
D. Jalannya Penelitian	52
E. Analisis Data.....	53
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kelemahan Formulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	55

1. Kelemahan Formulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	55
a. Kelemahan Formulasi Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	55
b. Kelemahan Formulasi Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	72
2. Kelemahan Formulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	77
a. Kelemahan Formulasi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	78
b. Kelemahan Formulasi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	80
c. Kelemahan Formulasi Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	82
B. Reformulasi Aturan Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang	85
1. Reformulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	86
a. Reformulasi Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	86
b. Reformulasi Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	93
2. Reformulasi Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara Subsider Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	99
a. Reformulasi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	100
b. Reformulasi Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	101

c. Reformulasi Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	102
BAB V	104
KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107